49

HUTAN RAKYAT : PENGEMBANGAN STRATEGIS KEHUTANAN

Dudung Darusman
(Lektor Kepala Ekonomi Sumberdaya Hutan dan Dekan Fahutan IPB)

Makalah Pembahas Pada Seminar Nasional Hutan Rakyat, HKTI, tanggal 29 Agustus 1995 di Jakarta

PENGANTAR

Prakarsa HTI menyelenggakan Seminar Nasional Hutan Rakyat sangatlah perlu dihargai, karena pengembangan hutan rakyat dalam arti luas merupakan langkah strategis bagi pembangunan kehutanan sendiri dan juga bagi ketahanan ekonomi nasional.

Bagi kehutanan, hutan rakyat diharapkan memberi kontribusi *supply* kayu yang cukup besar, yakni 8,7 juta m^3 per tahun selama Pelita VI. Bagi masyarakat, karena hutan rakyat pada umumnya berskala kecil maka berarti pemerataan pendapatan dan kesejahteraan yang lebih baik, sehingga semakin tercipta ketahanan ekonomi nasional.

KETIMPANGAN PELAKU EKONOMI KEHUTANAN

Dalam makalah yang saya sampaikan pada Diskusi Panel Penyempurnaan UUPK No. 5 1967 bulan Maret 1995 yang lalu, saya kemukakan salah satu masalah yang dihadapi sektor kehutanan adalah ketimpangan sebaran pelaku ekonomi yang sangat didominasi pengusaha berskala besar. Produksi kayu dan hasil-hasil hutan lainnya di tanah air ini dihasilkan HPH-HPH dan BUMN-BUMN yang semuanya berskala besar.

Di satu sisi, hal ketimpangan tersebut tersebut menyebabkan sedikitnya atau tidak adanya kesempatan berusaha bagi pelaku-pelaku ekonomi berskala kecil yang merupakan sebahagian besar dari populasi Bangsa Indonesia. Hutan produksi seluas 64 juta Ha, atau 34 % dari daratan Indonesia, hanya diusahakan oleh kurang lebih 500 pelaku saja.

Kesempatan berusaha lebih dibutuhkan lagi bagi masyarakat suatu bangsa yang merdeka dari pada sekedar kesempatan kerja dan pembagian pendapatan. Kalau ukuran keberhasilan pembangunan kita cukup : *income*, lapangan kerja dan pemerataan, maka mungkin dapat kita capai dalam keadaan tetap dijajah Belanda. Para pejuang perebut kemerdekaan dulu susah-payah berkorban adalah karena bertekad yakni agar orang pribumi menjadi tuan di rumahnya sendiri.

Di sisi yang lain, struktur pelaku ekonomi yang timpang seperti di atas akan menyebabkan sangat sensitif terhadap perubahan-perubahan, baik kondisi ekonomi (pasar) maupun kondisi politik. Kekuatan besar yang berada pada sejumlah kecil pelaku, akan terlalu kuat dan banyak pilihan untuk lari dari kondisi-kondisi yang berubah. Sebaliknya pelaku yang beragam dan berjumlah banyak akan sangat kenyal bertahan, karena tidak cukup kuat per individu untuk lari dari tantangan perubahan.

Di samping itu, pelaku yang sedikit akan mudah diorganisir untuk berubah, baik itu ke arah kebaikan maupun ke arah ketidakbaikan. Apabila yang sedikit itu memiliki kekuatan yang besar, maka perubahan yang berasal dari dalam mereka akan mudah saja terjadi. Sebaliknya akan sangat *resistant* apabila perubahan itu dimintakan dari luar (pengendalian). Jadi mungkin sekali keliru anggapan bahwa jumlah pelaku yang sedikit akan memudahkan pengendalian dibandingkan dengan pelaku yang banyak, apabila yang sedikit itu telah menguasi kekuatan yang banyak.

Konkritnya, jumlah produksi dari suatu sektor yang didominasi oleh pengusaha besar yang berjumlah sedikit akan mudah sekali mendadak naik atau turun akibat perubahan kondisi ekonomi/pasar ataupun kondisi politik yang ada. Hal mana sangat tidak baik bagi kestabilan ekonomi yang bersangkutan, tidak baik juga dari segi ketersediaan dan kelestarian sumberdaya alam yang mendukungnya.

Sesungguhnya FAO (1974) dalam *bukunya "An Introduction to Planning Forestry Development*" telah mengingatkan, bahwa kehutanan adalah salah satu sektor yang sangat *fleksible* dalam hal skala usaha dan penggunaan teknologi. Kehutanan dapat tetap *feasible* sekalipun dalam skala yang relatif kecil dan dengan teknologi yang relatif sederhana. Hal itu tidak hanya berlaku pada kegiatan pengusahaan hutannya saja, tetapi juga dalam industri pengolahan hasilnya. Jadi sangatlah keliru bila kehutanan selalu diasosiasikan dengan skala besar dan teknologi yang tinggi.

Rupa-rupanya, keadaan struktur pelaku ekonomi yang ekstrim timpang itu masih terjadi hanya di kehutanan, terutama di luar Jawa tentunya. Sektor-sektor lain sudah lama menghindarkannya, dengan secara terus menerus membina pelaku ekonomi skala menengah dan kecil. Kehutanan jauh ketinggalan, bahkan jangan-jangan dapat dianggap bergerakpun belum.

Kegiatan pembinaan hutan rakyat, terutama di luar Jawa, sama sekali belum diperhatikan. Sementara itu kegiatan penghijauan yang pernah dilaksanakan di kehutanan lebih bermotifkan pembinaan lingkungan hidup (pendekatan DAS) daripada pembinaan pelaku ekonomi kehutanan.

HUTAN RAKYAT : TEKNOLOGI TEPAT GUNA

Hutan rakyat dan industri pengolahan hasilnya merupakan pilihan teknologi budidaya dan industri yang tepat guna bagi wilayah-wilayah yang berlahan marjinal dengan kondisi sosio-budaya tradisional. Kondisi-kondisi tersebut dimiliki oleh sebagian besar wilayah/propinsi di Indonesia, khususnya di luar Jawa. Dalam makalah yang saya sampaikan pada Seminar Pelestarian Hutan Produksi Kalimantan Tengah bulan Desember 1993, dikemukakan bahwa "*small scale forestry and forest product industry*" adalah jawaban komprehensif terhadap masalah pembangunan di propinsi berlahan marjinal, seperti halnya Kalimantan Tengah.

Hutan dalam kondisinya yang alami, dapat memberikan banyak jenis hasil (sekalipun masing-masing dalam jumlah sedikit), tanpa banyak memerlukan campur tangan manusia, atau hanya dengan sedikit campur tangan pengelolaan dan teknologi sederhana saja. Banyak sudah penelitian yang menginventarisir jenis-jenis manfaat yang dapat diperoleh manusia dari sebidang areal hutan alam, yang berkaitan dengan makanan, peralatan kerajinan, kesehatan, keindahan, dan lain-lain.

Justru dalam perkembangan teknologi dan peradaban manusia yang mutahir, berbagai jenis hasil dari hutan alam itu semakin banyak dibutuhkan umat manusia. Artinya pasarnya semakin terbuka, dan nilai ekonominya semakin tinggi.

Adalah hikmah juga, bahwa permintaan pasar terhadap produk-produk yang bernilai tinggi itu umumnya tidak berjumlah banyak untuk setiap jenisnya. Sehingga secara ekonomi paling tepat diusahakan oleh pelaku-pelaku ekonomi tradisional berskala kecil dengan teknologi yang sederhana, yang berarti cukup dengan modal yang relatif kecil.

Di lain pihak, suatu ekosistem hutan dapat berkembang baik pada lahan-lahan yang sesungguhnya marjinal dari segi budidaya pertanian intensif. Banyak bukti menunjukkan bahwa pada umumnya pembukaan lahan hutan di luar Jawa untuk areal pertanian intensif menunjukkan perkembangan produksi yang kurang baik, bahkan sering kali mengecewakan. Lebih lanjut, areal yang sudah terlanjur dibuka terus mengalami degradasi yang serius.

Tampaknya, pilihan penggunaan lahan dalam bentuk hutan sebagaimana adanya adalah pilihan yang paling rasional. Dengan demikian pengembangan pengusahaan hutan rakyat pada wilayah-wilayah berlahan marjinal di tanah air menjadi suatu pilihan terbaik dan harus menjadi tugas semua pihak yang terkait.

HUTAN RAKYAT : MODERNISASI

Bagi kebanyakan masyarakat, asosiasi kehutanan dengan modernisasi terasa aneh dan lucu, karena modernisasi telah diasosiasikan dengan semakin mampunya manusia menaklukan unsur-unsur dan proses alam.

Mengembangkan hutan rakyat secara tradisional di tanah air bukan akan membuat masyarakat menjadi kembali kuno. Modernisasi hendaknya diartikan : lebih pandai memetik manfaat dari alam dengan pengorbanan yang serendah-rendahnya. Hal itu berarti tidak mengganggu/merobah ekosistem alam, namun dapat memanen lebih banyak jenis manfaat dari padanya.

Bukankah lebih modern, apabila manusia memperoleh kebutuhannya dengan cara memetik hasil dari alam tanpa harus menaklukan alamnya sendiri ? Bukankah menaklukan alam sendiri memerlukan pengorbanan ?

Dengan sikap yang "lebih modern" tersebut, masyarakat tidak harus mengkonversi hutan menjadi penggunaan lain, dengan budidaya yang intensif yang menghasilkan output homogen yang banyak, tetapi hendaknya tetap memelihara ekosistem hutan dengan memperolah output heterogen, yang bila dijumlahkan juga banyak.

Mengelola ekosistem hutan secara alami untuk menghasilkan berbagai barang dan jasa kebutuhan manusia adalah kecenderungan dari kemajuan berpikir manusia untuk dapat mempertahankan hidupnya dimasa yang akan datang, di planet bumi ini.

Oleh karena itu kelimpahan hutan di tanah air ini perlu dipelihara dan disyukuri. Tinggallah bagaimana kepandaian Bangsa Indonesia sendiri memanfaatkannya. Hutan rakyat adalah bentuk jawaban yang perlu dikembangan di tanah air ini.

HUTAN RAKYAT : KEAMANAN HUTAN

Apabila selama ini dalam *set-up* kelembagaan kehutanan yang ada gangguan dan kerusakan hutan semakin mengkhawatirkan, maka siapakah yang akan menjaga hutan nanti, apabila hutan telah menjadi bahagian dari kehidupan rakyatnya ?